

ABSTRAK

Muhammad Achyar Fauzi, NIM. 1502541573, Judul Tesis: *Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 59 – 66)*, Pembimbing I: Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. dan Pembimbing II: Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H. M.H., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Kata Kunci: *Ketentuan Pidana, Perbankan Syariah*

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak ditemukan sanksi pidana bagi lembaga keuangan syariah ataupun pihak yang terlibat transaksi dengannya yang tidak menjalankan prinsip syariah, ketentuan tentang pelanggaran prinsip syariah hanya dikenakan sanksi administratif sebagaimana pasal 56 undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang berbunyi “Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut.

Tujuan dari tesis ini adalah untuk membuat analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah serta menemukan formulasi terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga dapat menjadi rambu-rambu yang tegas untuk pelaksanaan usaha perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Formulasi pelaksanaan ketentuan pidana dalam undang-undang yang berbasis syariah dimana memasukkan konsep hukum Islam tentang ta'zir pada pelanggaran prinsip syariah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang memuat ketentuan bahwa denda pidana dapat dikelola atau diperuntukkan bagi lembaga-lembaga yang berperan dalam mashlahat ummat serta pemberlakuan sanksi tambahan bagi bank syariah selaku korporasi yang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

Muhammad Achyar Fauzi, NIM. 1502541573, Thesis Title: *Criminal Provisions of Law Number 21 in 2008 concerning Islamic Banking (Juridical Analysis of Articles 59-66)*, Supervisor I: Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. and Supervisor II: Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H. M.H., the Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Keywords: *Criminal Provisions, Islamic Banking*

Law number 21 in 2008 concerning sharia banking states there are no criminal sanctions for sharia financial institutions or parties involved in transactions with them who do not carry out sharia principles, provisions regarding violations of sharia principles are only subject to administrative sanctions as stated in article 56 of law number 21 in 2008 stating “Bank Indonesia shall impose administrative sanctions for Sharia Banks or UUS, members of the board of commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, directors, and/or employees of Sharia Banks or Conventional Commercial Banks owning UUS, which hinder and/or fail to implement Sharia Principles in implementing business or duties or does not fulfill its obligations as stipulated in this Law.”

This research was categorized as library research. Library research was a form of research methodology which emphasized literature as an object of the study. Literature research was carried out to examine a problem which was the topic of the research work or the conception.

The purpose of this research was to make an analysis of sharia economic law on the application of sanctions for sharia financial institutions and to find a formulation of the criminal provisions in law number 21 in 2008 concerning sharia banking so that they could be firm signs for the implementation of sharia banking businesses according to sharia principles.

The formulation of the implementation of criminal provisions in sharia-based laws includes the concept of Islamic law regarding ta'zir on violations of sharia principles in law number 21 in 2008 concerning sharia banking, which contains provisions that criminal fines can be managed or earmarked for institutions playing a role in the benefit of the ummah as well as the application of additional sanctions for sharia banks as corporations carrying out business activities contrary to sharia principles.